



Analisis Framing Gerakan Sosial: Studi Pada Gerakan Aksi Bela Islam 212

Bagus Riadi

Universitas Padjajaran

bagus16001@mail.unpad.ac.id

Diki Drajat

Universitas Padjajaran

diki16003@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Gerakan Aksi Bela Islam 212 sempat menjadi isu yang ramai diperbincangkan di kalangan akademisi. Masing-masing akademisi memiliki perspektif tersendiri dalam hal analisis tentang kemunculan Aksi Bela Islam. Salah satu yang menarik sebuah analisis dari Vedi Hadiz yang menjelaskan bahwa fenomena Aksi Bela Islam sejatinya adalah bentuk kekecewaan umat terhadap kegagalan sistem internasional. Mereka yang termarginalisasi kemudian menggunakan kendaraan 'populisme kanan' sebagai alat untuk mengekspresikan ketidakadilan. Namun artikel ini akan menjelaskan fenomena Aksi Bela Islam dengan analisis framing. Framing merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu (Sukmana, 2016). Pada umumnya analisis framing digunakan dalam studi komunikasi media. Namun dalam tulisan ini pendekatan framing yang digunakan ditinjau dari pendekatan gerakan sosial. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterlibatan media masa dalam membentuk framing terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya identitas kolektif. Beberapa bulan sebelum munculnya gerakan Aksi Bela Islam, terdapat aktor-aktor penting seperti GNPF-MUI dan FPI yang memainkan wacana dominan terkait dengan isu penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Munculnya gerakan Aksi Bela Islam I, II, dan II menunjukkan framing yang dilakukan untuk membentuk identitas kolektif oleh para aktor gerakan dalam membingkai peristiwa penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Kemunculan gerakan tersebut kemudian menjadi momentum konsolidasi umat Islam dalam usahanya melawan hegemoni sistem politik global yang termanifestasikan dalam bentuk kekuasaan pemerintah yang pada gilirannya dikemudian hari memunculkan wacana baru terkait gerakan #2019GantiPresiden.

Kata Kunci: Aksi Bela Islam, Framing, Identitas Kolektif

ABSTRACT

The 212 Movement was once a lively issue being discussed among academics. Each academician has his own perspective in terms of analysis of the emergence of the Islamic Defending Action. One of the highlights of an analysis from Vedi Hadiz which explains that the phenomenon of Islamic Defending Action is actually a form

of disillusionment with the failure of the international system. Those who are marginalized then use the vehicle "right populism" as a tool to express injustice. But this article will explain the phenomenon of Islamic Defending Action with framing analysis. Framing is a method of presenting reality in which the truth about an event is not totally denied, but it is subtly deflected, by giving an emphasis on certain aspects (Sukmana, 2016). In general, framing analysis is used in media communication studies. But in this paper the framing approach used is viewed in terms of the social movement approach. The results showed the involvement of the mass media in forming framing related to the factors that led to the creation of a collective identity. A few months before the emergence of the Islamic Defending Action movement, there were important actors such as the GNPf-MUI and FPI who played dominant discourse related to the issue of blasphemy by Ahok. The emergence of the Islamic Action Movement I, II, and III shows the framing carried out to form a collective identity by the movement's actors in framing the events of blasphemy on religion committed by Basuki Tjahaja Purnama. The emergence of the movement then becomes a momentum of consolidation of Muslims in their efforts to fight the hegemony of the global political system which is manifested in the form of government power which in turn will bring up new discourse regarding the #2019GantiPresiden movement.

Keywords: *Islamic Defending Action, Framing, Collective Identity*

Pendahuluan

Saat ini struktur dan kehidupan masyarakat telah mengalami banyak perubahan, perubahan tersebut terjadi bukan semata - mata tanpa sebab dan alasan. Banyaknya aspek dalam kehidupan masyarakat yang mengalami telah dimasuki oleh berbagai tatanan sosial sehingga perubahan sosial merupakan hal yang lebih mudah terjadi untuk saat ini. Kepentingan - kepentingan para elit maupun aktor politik menyebabkan masyarakat yang mengalami akibatnya karena untuk mengimplementasikan kepentingan - kepentingan para elit maka masyarakat harus dapat ikut andil didalamnya. Ketika pihak masyarakat tidak ingin ikut andil untuk melaksanakan kepentingan - kepentingan elit maka para elit pun akan melakukan banyak hal agar masyarakat dapat menuruti dan mengikuti keinginan mereka (Jainuri, 2012). Kendati demikian kerap kali mereka melakukan cara yang tidak seharusnya sehingga hal tersebut menyebabkan salah satu pihak dirugikan dari implementasi tersebut.

Dalam kehidupan sosial saat ini sebenarnya masyarakat telah banyak yang menyadari ketika para elit negara melakukan penyimpangan namun, masyarakat belum bisa menemukan tempat untuk menyampaikan aspirasi tersebut karena pihak pemerintah kerap kali membatasi suara - suara masyarakat. Tetapi keadaan ini juga kerap kali dimanfaatkan oleh beberapa elit ketika mereka telah mengetahui keinginan masyarakat maka mereka mencoba masuk ke dalam kehidupan sosial dengan membungkus bahwasannya mereka dapat dijadikan tempat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tetapi disini masyarakat juga digiring oleh para elit agar dapat melakukan kepentingan - kepentingan yang mereka harapkan. Salah satunya ialah populisme islam saat ini melalui aksi 212 melalui gerakan 212 masyarakat merasa ada tempat untuk menyalurkan aspirasi politik mereka melalui gerakan islam ini (Mudhoffir, 2017). Tetapi apabila kita tilik lebih mendalam gerakan ini dijadikan alat untuk beberapa kepentingan elit politik. Maka tulisan ini akan menyajikan analisis tentang kemunculan Gerakan Aksi Bela Islam 212 dilihat dengan analisis framing?

Tinjauan Literatur

Teori Cultural Framing

Cultural framing merupakan teori yang dianggap kerap kali digunakan oleh setiap individu dalam setiap aktivitas sehari - harinya. Sehingga teori pembingkai ini merupakan teori yang memiliki kaitannya dengan setiap aktivitas individu. Seperti yang dikatakan oleh Erving Goffman dalam Sukmana (1974) yang sekaligus sosiolog beliau mengatakan bahwa teori pembingkai ini ialah desain bingkai penafsiran yang digunakan individu sehari - hari merupakan pengalaman untuk memahami dunia sehingga tidak heran apabila teori ini dianggap penting dalam media. Media dalam konsep disini memiliki pengaruh terhadap pembentukan opini yang terjadi dalam realitas peristiwa kepada masyarakat yang langsung dirasakan oleh setiap individu. Teori *framing* mengklaim adanya hubungan antara agenda politik dan permasalahan politik yang terjadi sehingga menjadi suatu hal yang umum ketika berbicara mengenai *framing* maka memiliki keterkaitan dengan para aktor politik. Adanya penyusunan agenda yang dimaksud disini ialah permasalahan sosial yang kerap kali terjadi dalam realitas sosial ditunggangi oleh para aktor politik untuk mendapatkan tujuan dan kepentingannya.

Teori pembingkai dalam perkembangannya pada tahun 1970-an yang diselidiki oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw mereka mengembangkan pendekatan penyusunan agenda dan klaim terhadap adanya hubungan antara jumlah jangkauan masalah politik dengan agenda politik khalayak. Selain itu menurut W. A. Gamson juga mendefinisikan bahwa untuk melakukan penyelidikan terhadap *framing* ini dapat melakukan dua pendekatan yang pertama melalui pendekatan kultural dan yang kedua melalui pendekatan psikologis. Dalam penyelidikannya oleh beberapa ahli pada intinya bahwa *framing* digunakan untuk mengetahui seperti apa itu realitas dibingkai oleh media sehingga melalui pembingkai ini dapat diketahui siapa itu lawan begitupun siapa aktor yang mengendalikan opini yang muncul dalam realitas masyarakat hingga yang dirugikan dan diuntungkan sampai hal lainnya. Dalam teori *framing* ini kerap kali dikaitkan dengan berbagai macam isu identitas seperti halnya yang telah terjadi pada awal mula berkembangnya teori *framing* hingga saat ini isu permasalahan agama menjadi opini yang digunakan melalui teori pembingkai (Hasan, 2006).

Istilah *framing* dalam studi gerakan sosial pertamakali diperkenalkan oleh Goffman dalam Sukmana (2016). *Framing* merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu (Sukmana, 2016). Maksudnya bahwa *framing* adalah suatu upaya untuk membelokkan realitas berdasarkan kepentingan tertentu untuk dapat diterima sebagai asumsi kebenaran bagi masyarakat. Dalam perspektif gerakan sosial *framing* tentu digunakan sebagai upaya untuk menjangkau simpati masyarakat yang tujuannya untuk memunculkan gerakan sosial. Oleh karenanya upaya *framing* tidak dapat dilepaskan dari peran media sebagai alat pemberi pesan. Melalui *framing*, media masa secara tidak langsung telah mengkonstruksi makna terhadap suatu peristiwa, sehingga persepsi masyarakat terhadap realitas dapat dibentuk sesuai dengan keinginan pembuat *framing*.

Proses pembingkai kultural (*cultural framing*) gerakan sosial (*social movement*) dengan konstruksi identitas partisipan gerakan. Berbagai kajian yang membahas tentang perkembangan dan identifikasi konsep identitas kolektif (*collective identity*) telah banyak dilakukan, baik menurut perspektif Amerika maupun eropa kontinental. Johnston dan Klandermans (1995) mendefinisikan identitas kolektif (*collective identity*) sebagai saling interaksi dan berbagai yang diproduksi oleh beberapa individu (atau kelompok pada level yang lebih

kompeks) dan memusatkan orientasinya pada tindakan serta peluang dan kendala dimasa aksi terjadi.

Ada tiga unsur yang dimiliki identitas kolektif, diantaranya yaitu : 1) Identitas kolektif sebagai proses yang melibatkan definisi kognitif tentang tujuan, sarana, dan bidang tindakan. 2) Identitas kolektif adalah sebagai proses yang mengacu kepada jaringan relasi aktif antara aktor yang berinteraksi (*interact*), berkomunikasi (*communicate*), saling memengaruhi (*influence each other*), negosiasi (*negotiate*), dan membuat keputusan (*make decisions*). 3) Tingkat tertentu dari investasi emosional, yang memungkinkan individu merakakan seperti sebagai bagian dari suatu kesatuan.

Konstruksi Identitas Kolektif

Benford dan Snow dalam Sukmana (2016) menjelaskan bahwa *framing* membantu untuk membuat suatu peristiwa atau kejadian memiliki makna dan dengan demikian berfungsi untuk mengatur pengalaman dan membimbing tindakan. Dengan demikian cara kerja *framing* adalah berupaya untuk menanamkan identitas yang sama kepada masyarakat. Proses ini dimulai dari menanamkan identitas kepada individu. Kemudian dari individu-individu yang mempunyai identitas yang sama atas persepsinya terhadap suatu peristiwa dapat membentuk identitas kolektif yang pada gilirannya menjadi potensi kemunculan gerakan.

Proses *framing* berkaitan erat dengan diskursus bagaimana suatu tanda di *frame* sedemikian rupa untuk dapat memproduksi makna yang kemudian diyakini sebagai kebenaran oleh masyarakat. Kemudian mengatur mereka bagaimana bertindak dan berperilaku. Dalam hal ini gerakan sosial bukan lagi berbicara tentang dominasi atau akumulasi rasa ketidakpuasan masyarakat. Tetapi bagaimana individu dapat digerakan oleh pemaknaan yang sama dengan individu lain, dan bagaimana individu tersebut tersebut secara sukarela menerima identitas dan pemaknaan yang diberikan yang kemudian menjadi pemaknaan universal.

Oleh karenanya, konsep *cultural framing* juga memiliki keterkaitan dengan teori berorientasi identitas (*the Identity-Oriented theory*). Berdasarkan teori ini, kemunculan integrasi dan solidaritas gerakan tercipta dari identitas kolektif. Blumer dalam Sukmana (2016) menjelaskan bahwa gerakan harus mengembangkan *esprit de corps* (semangat korps) diantara anggota melalui konstruksi *in-group-out-group relationship*. Dalam arti bahwa sebuah gerakan dapat mencapai semangat kesatuan/korps yang tercipta jika suatu kelompok gerakan tersebut memiliki identitas kolektif, kemudian menghadapi musuh bersama yang telah dikonstruksi oleh *framing*.

Dalam membingkai suatu peristiwa sosial yang akan memunculkan suatu efek politis, peran aktor gerakan sosial dianggap penting untuk memelihara makna yang hendak disampaikan kepada khalayak. Bagi McAdams (dalam Sukmana, 2016:193) penyampaian makna yang ditujukan kepada audiens berkaitan erat dengan pembentukan kelompok sosial yang dibentuk untuk mencapai keberhasilan dalam meraih akses kepada kekuasaan politik, maka sebuah gerakan sosial diharuskan untuk membentuk sebuah struktur *solidarity incentive*, jaringan komunikasi, dan pemimpin yang diakui. Hal tersebut bertujuan agar pembingkai makna yang hendak disampaikan semakin bersesuaian dengan efek yang dikehendaki oleh organisasi.

Pembingkai makna tersebut pada akhirnya menimbulkan motivasi sosial dan antar-personal untuk mengambil bagian dalam kelompok bersama anggota yang lainnya (*ibid.hal:192*). Penciptaan identitas kolektif ini pada akhirnya memunculkan suatu persepsi bahwa individu maupun kelompok yang tidak mau bergabung kedalam kelompok gerakan merupakan pihak yang apatis atau bahkan tergolong kedalam pihak yang menjadi oposisi gerakan. Persepsi tersebut kemudian memunculkan anggapan bahwa dengan bergabungnya individu maupun kelompok kedalam gerakan, maka akan didapat keuntungan berupa pengalaman dan kedekatan dengan

anggota gerakan lainnya, sementara terhindar dari rasa tidak nyaman akibat keengganan untuk bergabung kedalam gerakan yang memunculkan konsekuensi berupa hukuman secara sosial.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi literatur. Pengumpulan literatur diperoleh dari perpustakaan dan media elektronik yang kredibel terkait dengan gerakan Aksi Bela Islam 212. Penelusuran literatur terkait dengan analisis *framing* dilakukan untuk melakukan pendalaman teoritis sehingga dapat mempertajam pisau bedah dalam menganalisis gerakan Aksi Bela Islam 212 dengan analisis *framing*. Data yang telah diperoleh kemudian divalidasi dengan metode triangulasi. Data yang telah dinyatakan valid kemudian dianalisis dengan analisis *framing* untuk dapat menciptakan penjelasan yang holistik. Proses *framing* yang memunculkan gerakan Aksi Bela Islam akan dijelaskan dengan argumentasi yang didasarkan pada paradigma teori gerakan sosial perspektif komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Peran Media dalam Framing Gerakan Aksi Bela Islam 212

Kemunculan gerakan sosial berupa berhimpunnya massa Islam dalam jumlah besar di Provinsi DKI Jakarta yang menuntut agar diberlakukannya proses hukum terhadap gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga telah melakukan penistaan agama setelah beredar video rekaman dirinya yang menunjukkan kebencian terhadap kelompok Muslim, yang beberapa waktu lalu sempat menjadi bahan perbincangan secara luas, baik dalam ranah keagamaan, politik, hingga akademik. Gerakan yang kemudian dinamakan “Aksi Bela Islam” pertama kali dimulai pada 14 Oktober 2016 hingga 5 Mei 2017 tersebut dipimpin oleh Habib Rizieq Syihab dari Front Pembela Islam (FPI), dan Bachtiar Nasir dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dengan tujuan semula untuk mengawal kepastian hukum atas kasus Ahok, mengingatkan agar masyarakat Muslim hanya memilih pemimpin dari golongan Muslim, dan meningkatkan solidaritas di kalangan umat (Prakoso, 2017).

Wacana dominan yang diketengahkan oleh GNPF-MUI dalam upaya untuk meyakinkan masyarakat Muslim bahwasanya Ahok telah melakukan penistaan agama adalah dengan menempatkan Ahok sebagai non-muslim (juga berasal dari golongan minoritas) yang telah berani menyatakan bahwa Al-Maidah ayat 51 digunakan untuk membohongi masyarakat agar tidak memilih pemimpin kafir (non-muslim) (Pamungkas & Octaviani, 2017 hal:67). Dari wacana yang diangkat oleh GNPF-MUI tersebut didapat tiga pemaknaan yang berusaha disampaikan kepada khalayak komunitas Muslim:

1. Pernyataan Ahok pada kunjungan dinas di Kepulauan Seribu merupakan bentuk penistaan sebab diucapkan kepada khalayak komunitas Muslim Indonesia karena tidak terbatas pada masyarakat Kepulauan Seribu yang hadir pada saat Ahok melontarkan ucapan tersebut serta masyarakat DKI Jakarta yang dalam waktu dekat akan melangsungkan Pilkada. Hal tersebut diindikasikan dengan pernyataan Ahok yang tidak menasar kepada objek yang spesifik (warga DKI), namun lebih bersifat plural, sehingga mampu memicu kemarahan masyarakat Muslim diluar DKI Jakarta, terbukti dengan kehadiran rombongan yang berasal dari luar DKI Jakarta pada serangkaian demonstrasi ‘Aksi Bela Islam’.
2. Pernyataan Ahok mengindikasikan adanya unsur pelecehan terhadap ulama yang notabene memiliki kedudukan tinggi dalam agama Islam. Hal tersebut terindikasi dari ungkapan “jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51” yang memunculkan pertanyaan: “siapa yang melakukan upaya pembohongan publik dengan menggunakan Al-Maidah ayat 51?”. Maka dengan demikian diketahui jawabannya bahwa sosok yang

berwenang untuk menyampaikan Al-Maidah ayat 51 tidak lain adalah berasal dari kalangan ulama.

3. Pernyataan Ahok juga dipandang memiliki tendensi untuk melecehkan Al-Maidah ayat 51 karena hanya digunakan sebagai upaya untuk memperdayai masyarakat Muslim agar tidak mau dipimpin oleh pemimpin dari kalangan non-muslim. Kecenderungan tersebut tercermin dari pernyataan “jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51” yang mengindikasikan bahwa Al-Maidah digunakan sebagai media untuk membohongi audiens.

Framing yang dilakukan oleh GNPf-MUI dan FPI terhadap pernyataan Ahok bertujuan untuk memunculkan motivasi sosial dan antar-personal agar individu dapat mengambil bagian dalam gerakan kelompok bersama anggota lainnya (Sukmana, 2016) dengan meletakkan Ahok sebagai musuh bersama umat Muslim di seluruh Indonesia (berkat ketiadaan objek spesifik yang dimaksud Ahok dalam pernyataan kontroversialnya). Terlebih lagi dorongan tersebut juga didukung dengan manfaat dari individu yang tergabung kedalam gerakan seperti pengalaman baru, serta dapat menjalin relasi dengan ormas Islam mereka di ibukota.

Dorongan untuk melangsungkan aksi demonstrasi tersebut dipicu oleh adanya identitas kolektif yang terbentuk akibat *framing* terhadap pernyataan Ahok yang dilakukan oleh GNPf-MUI dan FPI. Identitas kolektif tersebut terbentuk akibat pluralitas objek dari pernyataan Ahok pada akhirnya mengundang kemarahan dari sekian banyak umat Muslim diluar kawasan ibukota untuk turut mengambil bagian dalam Aksi Bela Islam, dapat dipastikan bahwa seluruh eksponen Aksi Bela Islam memiliki perasaan yang sama ketika identitas kolektif mereka dipertentangkan dengan identitas Ahok (non-muslim dan kelompok minoritas) beserta pendukungnya.

Pembentukan identitas kolektif tersebut di saat yang bersamaan memunculkan eksekse berupa terbentuknya *framing* baru dari kelompok gerakan terhadap individu-individu maupun kelompok yang menolak untuk turut serta menentang Ahok, dengan konsekuensi berupa sanksi sosial. Hal tersebut rupanya terealisasi pada momen Pilkada DKI dimana Ahok sebagai petahana mencalonkan diri. Adalah Hindun bin Raisman seorang nenek yang wafat pada usia 78 tahun, dimana warga sekitar menolak menshalatkannya karena memilih Ahok dalam Pilkada (Liputan6, 2017).

Adanya fenomena tersebut kemudian mengindikasikan temuan bahwa kelompok gerakan sosial tidak hanya membentuk *framing* terhadap suatu isu, dalam upaya menggali dukungan untuk merubah realitas –dalam hal ini memenjarakan Ahok dan membuatnya tidak populer dalam Pilkada DKI. Namun sejalan dengan gagasan (Sztompka, 1993), *framing* yang dibuat oleh kelompok gerakan dapat ditujukan untuk menghadapi realitas baru seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi akibat aktivitas dari gerakan, dalam hal ini *framing* kelompok gerakan bertujuan untuk memunculkan kesan bahwa kelompok yang berada diluar mereka –terlebih kelompok pendukung Ahok—merupakan kelompok yang sama (atau setidaknya *like minded group*) dengan kelompok pendukung Ahok yang menjadi seteru utama pada saat aksi mempidanakan Ahok dilangsungkan.

Identitas Kolektif dalam Gerakan Aksi Bela Islam 212

Munculnya gerakan Aksi Bela Islam I, II, dan III menunjukkan keberhasilan *framing* yang dilakukan oleh para aktor gerakan dalam membingkai peristiwa penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Keberhasilan tersebut muncul karena para aktor gerakan berhasil menanamkan identitas kolektif kepada masyarakat. Melalui *framing*, para aktor gerakan membentuk persepsi masyarakat terhadap isu penistaan agama tersebut. Sehingga masyarakat

memperoleh kesadaran bahwa identitasnya sebagai umat Islam telah dilecehkan. Ketika identitas kolektif telah tertanam dalam persepsi masyarakat, maka kemudian masyarakat dapat dimobilisasi dengan mudah. Terbukti dengan besarnya animo masyarakat yang ikut dalam gerakan 212 menunjukkan emosi yang telah terkumpul dalam benak masyarakat berhasil dimobilisasi untuk diartikulasikan kepada pemerintah.¹

Menurut Mudhoffir, Yasih, & Hakim (2017), menyatakan bahwa munculnya gerakan 212 merupakan fenomena bangkitnya populisme Islam di Indonesia. Islam kemudian dianggap sebagai gerakan yang dapat diandalkan untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat dalam menghadapi era neoliberalisme. Populisme Islam merupakan model baru dan muncul sebagai kandidat kuat dalam menentang neoliberalisme global. Sebelum Islam, populisme yang berkembang sebelum munculnya Perang Dingin adalah komunisme dan sosialisme. Indonesia sendiri punya sejarah traumatik terkait keberadaan komunisme di Indonesia. Sehingga perlawanan terhadap penguasa dengan saluran komunis tidak lagi dianggap efektif. Hal ini menyebabkan Islam sebagai kendaraan politik yang paling memungkinkan digunakan oleh masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingannya terhadap pemerintah. Apalagi di Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia. Membuatnya memiliki sumber daya yang besar untuk membentuk sebuah gerakan.

Kasus penistaan agama oleh Ahok hanyalah sekelumit isu kecil terkait krisis yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Jauh sebelum kasus Ahok, sesungguhnya telah terbentuk kekecewaan masyarakat terhadap sistem yang dinilai memarginalkan golongan Islam tersebut. Ekspresi masyarakat yang telah memuncal kemudian mendapatkan momentumnya ketika muncul kasus penistaan agama oleh Ahok. Terlebih setelah peristiwa tersebut di *framing* oleh simpatisan gerakan di media sosial. Membuatnya menjadi saluran politik utama untuk mengartikulasikan kekecewaan masyarakat terhadap penguasa yang dianggap gagal mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi. Termarginalisasi dalam sebuah sistem politik global membuat komunitas-komunitas muslim itu setidaknya memiliki satu persamaan: tertindas. Hal tersebut pada gilirannya melahirkan corak populisme Islam model baru sebagaimana yang kita rasakan saat ini (Garadian, 2017).

Habib Rizieq Shihab yang kemudian diangkat menjadi Imam Besar Umat Islam Indonesia menggunakan tiga isu krusial yang menjadi bahan bakar mobilisasi antar kelas dalam gerakan Aksi Bela Islam 212. Ketiga isu krusial tersebut antara lain: isu Tionghoa, penista agama, dan kafir (Garadian, 2017). Rizeq Shihab menanamkan persepsi bahwa umat Islam dalam keadaan kritis dan perlu bangkit dari keterpurukan dengan menyatukan gerakan. Kemunculan gerakan tersebut kemudian menjadi momentum konsolidasi umat Islam dalam usahanya melawan hegemoni sistem politik global yang termanifestasikan dalam bentuk kekuasaan pemerintah.

Framing menjadi pemicu konsolidasi umat Islam terkait dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Dari hal tersebut kemudian memunculkan kesadaran bahwa umat Islam sedang berada dalam kondisi yang tertindas dan termarginalkan dalam sistem global. Kesadaran akan masalah-masalah tersebut kemudian menjadi titik balik populisme Islam di berbagai penjuru dunia. Termasuk populisme Islam di Indonesia yang termanifestasikan dalam gerakan Aksi Bela Islam. Masalah-masalah yang menimpa umat Islam tersebut antara lain menyangkut masalah sosial, ekonomi, dan politik (Kuntowijoyo, 1997).

Dalam kasus Aksi Bela Islam 212, kesadaran bersama dalam identitas kolektif tersebut pada akhirnya memunculkan tuntutan untuk mengadili Ahok terkait dengan sikapnya yang dianggap telah melecehkan Al-Qur'an dan Ulama. Identitas kolektif tersebut semakin menguat ketika

¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161205091436-20-177377/menghitung-jumlah-peserta-aksi212-di-jantung-jakarta>. Diakses pada Sabtu, 17 November 2018

gerakan Aksi Bela Islam tersebut menganggap memiliki musuh bersama yang dalam hal ini adalah rezim. Kedekatan pemerintah dengan Ahok menjadi salah satu alasan bagi gerakan Islam untuk menjadikan penguasa sebagai musuh bersama. Pola *in-group* dan *out-group* tersebut semakin memperkuat konsolidasi *in-group* gerakan tersebut. Identitas kolektif tersebut semakin diperkuat dengan momen-momen solidnya masa aksi yang dipublikasikan ke dunia maya. Momen yang terabadikan tersebut kemudian semakin memperkuat rasa persatuan diantara masa aksi. Sehingga dalam prosesnya populisme Islam ini memunculkan agenda-agenda lain seperti munculnya 212 *mart* dan berbagai himbauan oleh para *mubaligh* akan pentingnya memperkuat ekonomi umat. Serta agenda-agenda lain yang muncul seperti wacana tentang pembentukan negara *khilafah*, dan isu 2019 Ganti Presiden yang tidak dapat dijelaskan secara mendalam pada tulisan ini.

Simpulan

Apabila ditilik melalui analisis *framing*, gerakan Aksi Bela Islam 212 yang terjadi merupakan gerakan yang dilakukan oleh mereka para aktor - aktor para penggerak islam yang menginginkan adanya perubahan dalam struktur dan gerakan politik khususnya dalam kepemimpinan sosial. Memang pada mulanya gerakan Aksi Bela Islam 212 merupakan bentuk ekspresi kemarahan masyarakat terhadap penistaan agama dan ketidakadilan yang telah dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Namun perlu diingat bahwa kemunculan gerakan tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan para aktor gerakan dalam memproduksi wacana sebagai bentuk *framing* suatu peristiwa kepada masyarakat. *Framing* tersebut yang kemudian menciptakan identitas kolektif sehingga muncul pihak yang dianggap sebagai musuh bersama. Namun perlu diingat bahwa masalah pokok dari munculnya gerakan bukan hanya sebatas pada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Lebih jauh dari itu, terdapat ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap ketidakadilan sebagai implikasi dari rezim internasional yang berlaku saat ini. Masyarakat yang tidak memiliki kendaraan dalam mengekspresikan ketidakadilannya tersebut kemudian mendapat momentum pada Aksi Bela Islam. Namun, pada akhirnya gerakan Aksi Bela Islam 212 ini kemudian hanya dijadikan kendaraan bagi elit politik untuk meraih kekuasaan. Sehingga kemunculan gerakan Aksi Bela Islam tidak sampai pada upaya umat untuk ikut terlibat dalam mempengaruhi sistem politik, gerakan menjadi kepentingan elektoral semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Garadian, E. A. (2017). Membaca Populisme Islam Model Baru. *Studia Islamika*, 379-393.
- Goffman, E. (1974). *Frame Analysis: An Essay on The Organization of Experience*. Harvard University Press.
- Hasan, N. (2006). Book Review: Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas-DISIPLIN. *Al-Jamiah*, 241-250.
- Jainuri. (2012). *Elite Partai dan Dinamika Politik di Aras Lokal*. Diambil kembali dari pemerintah.umm.ac.id: <http://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/orang%20kuat%20partai%20di%20aras%20lokal.pdf>
- Kuntowijoyo. (1997). *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung.
- Liputan6. (2017, Maret 10). *Jenazah Nenek Hindun Ditelantarkan Warga Setelah Pilih Ahok*. Diambil kembali dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/news/read/2882270/jenazah-nenek-hindun-ditelantarkan-warga-setelah-pilih-ahok>

- Mudhoffir, A. M. (2017). Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi di Indonesia. *Prisma*, 48-60.
- Pamungkas, A. S., & Octaviani, G. (2017). Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunitas Luring. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 68.
- Prakoso, A. (2017, Januari 23). *Usai Diperiksa, Habib Rizieq Minta Pendukungnya Laporkan Pimpinan Partai Politik Penista Agama*. Diambil kembali dari [Tribunnews.com](http://tribunnews.com): Usai Diperiksa, Habib Rizieq Minta Pendukungnya Laporkan Pimpinan Partai Politik Penista Agama
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Sztompka, P. (1993). *Sociology of Social Change*. Oxford: Blackwell.